

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hendrawan, Marsaulina, and Shatrya, “Peran Dan Pengawasan Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara.”
- Muhammad Ashri, Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar, 1st ed. (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018), 2.
- Nasional, B. P. H. Interaksi Hukum Nasional Dan Internasional Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Separatisme Di Indonesia. [L¹SEP]Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (NTB: Mataram University Press, 2020).
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik. Nuansa Cendekia.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum.
- Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan. Bumi Aksara.

Artikel Jurnal

- Ali Noez Zaman, “Keterlibatan Pemerintahan Joko Widodo dalam Upaya Perdamaian di Afghanistan,” Jurnal Independen Universitas Muhammadiyah Jakarta 1, no. 2 (2020): 5.
- Azam, J.P., & F. Gubert. (2006). Migrants’ Remittances and the Household in Africa: A Review of the Evidence. Journal of African Economies, 15, AERC Supplement 2, pp. 426-462.
- Dinamika Imigran Muslim di Perancis Melalui Ruang Publik Pada Pemerintahan Nicholas Sarkozy, Op.cit.,171.
- Dinata, A. W., & Akbar, M. Y. (2021). Pembatasan hak untuk bergerak (Right To Move) melalui larangan masuk dan pembatasan perjalanan selama penyebaran virus COVID-19 menurut hukum internasional dan hukum indonesia. Jurnal HAM, 12(2), 305-324.
- Eco Silalahi, “Implikasi Hukum Internasional Pada Flight Information Region (FIR) Singapura Atas Wilayah Udara Indonesia Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau 2, No. 1 (2015).
- Fudzcha Putri Jazilah MM, Djoko Susilo, dkk “Kepentingan Nicolas Sarkozy dalam Pembuatan Kebijakan Imigrasi di Perancis (Nicolas Sarkozy’s Interest in Immigration Policy Making in France),” Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa (2012): 1.
- Gusnelly (2010). Migrasi, Kewarganegaraan, dan Partisipasi Imigran: Studi Kasus Imigran Turki di Belanda. Jurnal Kajian Wilayah, 1(1), pp. 59-78.
- I Made Subawa, “Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945,” jurnal.hukumonline.com 33, no. 1 (2008): 3.
- James Reinaldo Rumpia & H.S. Tisnanta, “Hukum dan Bahasa: Refleksi dan Transformasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1,” jurnal.unej.ac.id 5, no. 2 (2018): 250.
- Junior Perdana Sande, “Selective Policy Imigrasi Indonesia Terhadap Orang Asing Dari Negara *Calling Visa*,” ejournal.undip.ac.id 5, no. 1 (2020). [L¹SEP]Ayu Farida Fithria Maghfiroh, “Krisis Keamanan dan Konflik Sosial Berkepanjangan di Nigeria,” Digital Repository Universitas Jember (Jember, Universitas Jember 2017): vii.
- Koesmoyo Ponco Aji, Anindito Rizki Wiraputra, and Sri Kuncoro Bawono, “The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Legal Concept of Visas in Indonesia,” Law and Humanities Quarterly Reviews 1, no. 4 (2022).
- Kusuma, N. M. W. (2014). Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Mengenai Tanggung Jawab Penjamin Atas Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Bali. Udayana University.

- M. Alvi Syahrin & Setiawan Saputra, “Tindakan Hukum Terhadap Orang Asing Mantan Narapidana yang Memiliki Kartu Pengungsi UNHCR dalam Perspektif Keimigrasian (Legal Action On Ex-Convict Foreigners Holder of UNHCR Refugee Card From The Immigration Point Of View),” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 144.
- M. Alvi Syahrin, “Prinsip Kebijakan Selektif Keimigrasian,” *Opinio Juris* 9, no. 4 (2019): 26–41.
- Mission Of Indonesia, “Pembahasan Laporan Indonesia Terkait Implementasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Jenewa, 30 April – 1 Mei 2014,” *Human Rights and Humanitarian Issues* (2014), 1.
- Mochamad Arya Seta, “Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional” web.unair.ac.id/ (Surabaya: Universitas Airlangga, 2014).
- Moddie Alvianto Wicaksono, “Dinamika Imigran Muslim Di Perancis Melalui Ruang Publik Pada Pemerintahan Nicholas Sarkozy,” *Jurnal Transformasi Global* 4, no. 2 (2017): 175.
- Monoarfa, K. (2021). Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Orang asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Lex Et Societatis*, 9(1).
- Monoarfa, K. (2021). Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Orang asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Lex Et Societatis*, 9(1).
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145-157.
- Negara Hendrawan, Lidya Marsaulina, and Maulana Shatrya, “Peran Dan Pengawasan Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara,” *JIIP (Journal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 5, no. 12 (2022): 5534–5543.
- Ningtyas, E. W. (2024). Rancangan US Citizenship Act Of 2021 Amerika Serikat untuk mereformasi Kebijakan Imigrasi Tahun 2021 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Putri, “Penguatan Fungsi Keimigrasian Sebagai Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020 - 2024.”
- Rachman, M. A. R. (2018). Analisis Kebijakan Travel Ban Oleh Donald Trump. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(02), 227-236.
- Rahmi, T. Y. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Wna Pemegang KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) Menurut UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Riandi, A. (2018). Deskripsi Pengaruh Statuta Yahudi 3 Oktober 1940 Terhadap Kaum Yahudi Di Prancis Pada Era Pemerintahan Vichy 1940-1944 (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Rima Sari Indra Putri, “Penguatan Fungsi Keimigrasian Sebagai Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020 - 2024,” *Journal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 3, no. 1 (2020): 37–44.
- Saddam Hussein, “Eksistensi Amerika Serikat Sebagai Kekuatan Global,” *Global & Policy* 1, no. 1 (2013):85.
- Sania Nizar Putri Ashari and Koesmoyo Ponco Aji, “Evaluation of the Implementation of Socialization for the Prevention of Non-Procedural Pmi and the Crime of Trafficking in People (Dppo) in Tambakrejo Village, Gurah District, Kediri Regency,” *Jurnal Abdimas Imigrasi* 2, no. 1 (2021): 21–28.
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101-113.
- Susanto, F. A. (2020). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Di Negara Non-Anggota Konvensi Status Pengungsi 1951. *Law Review*, 20(2), 169.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA NEGARA SUBJEK CALLING VISA

PUTU MAHA PERMANA ADITYA, Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., MA.

Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Tatar Bonar Silitonga. Tantangan Globalisasi, Peran Negara, dan Implikasinya terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Negara. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 17 No. 1 (2020), hlm. 15–28.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN Tahun 1999 Nomor 165

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, LN Tahun 2006

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN Tahun 2011

Internet

Australian Government, Department of Home Affairs, Immigration and Citizenship “Global Special Humanitarian Visa,” <https://immi.homeaffairs.gov.au/>, diakses pada hari Senin (23/09/2025), pukul 15:03 WIB.

expatica.com, “Guide to Visas and Immigration in France”, <https://www.expatica.com/fr/>, diakses pada hari Kamis (2/09/2025), pukul 19:31 WIB.

Populix, “Apa Itu Bonus Demografi,” <https://www.info.populix.co/post/bonus-demografi-adalah>, diakses pada hari Kamis (19/08/2025), pukul 20:10 WIB.

setkab.go.id, “Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas-Aktif dalam Hubungan Internasional,” <https://Setkab.Go.Id/>, diakses pada Hari Kamis (24/06/2021) pukul 10:19 WIB.

Smartlegal.Id, “Negara yang Masuk Daftar *Clearance House* (CH),” <https://smartlegal.id/>, diakses pada hari Minggu (12/06/2021), pukul 12:30 WIB.